BNPB

SEKRETARIAT NASIONAL
S P A B
Satuan Pendidikan Aman Bencana





PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA

"Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia"







SEKRETARIAT NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

Tim Penyunting

Poppy Dewi Puspitawati (Kemendikbud)

Sri Renani Pantjastuti (Kemendikbud)

Lilik Kurniawan (BNPB)

Praptono (Kemendikbud)

Yusra Tebe (Unicef)

Penulis

Avianto Amri (Macquarie University)

Kontributor

Mohd Robi Amri (BNPB)

Pratomo Cahyo Nugroho (BNPB)

Elfina Rozita (BNPB)

Faisal Khalid (Kemendikbud)

Jamjam Muzaki (Seknas SPAB)

Asep Koswara (YKRI)

Ida Ngurah (YSTC)

Maulinna Utaminingsih (YSTC)

Rani Sawitri (ASB)

Mariana Pardede (KYPA)

Widowati (HFI)

Yayah Ruchyati (LPBI NU)

Ksatria Ratu Dewa (Perkumpulan KerLiP)

Desain dan Tata Letak

Box Breaker

TENTANG BUKU INI

Buku ini membahas berbagai capaian, tantangan, dan peluang terkait Pendidikan Tangguh Bencana atau program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Buku ini memaparkan mengenai konsep pendidikan tangguh bencana, sejarah berkembangnya program ini, serta pihak-pihak yang terlibat.

Penyusunan buku ini merupakan inisiasi Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) yang dikoordinir oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan didukung oleh Unicef, Yayasan Plan International Indonesia, dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Materi untuk penyusunan buku ini bersumber dari berbagai lembaga, antara lain: ASB, BNPB, Box Breaker, Hope Worldwide Indonesia, IDEP, Kemendikbud, KYPA, LIPI, LPBI NU, MDMC, Perkumpulan KerLiP, PMI, Risk Frontiers/ Macquarie University, UNDP, UNESCO, UNICEF, WVI, Yayasan Khadam Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.



PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA

"Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia"



Sumber Foto: ASB & YSTC

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya buku Pendidikan Tangguh Bencana "mewujudkan satuan pendidikan aman bencana" dapat diterbitkan. Buku ini menyajikan perkembangan penerapan pendidikan kebencanaan khususnya satuan pendidikan aman bencana (SPAB) di Indonesia.

Sejak peluncuran kampanye sejuta sekolah dan rumah sakit aman dari bencana, program satuan pendidikan aman bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Seiring dengan adanya kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan hal tersebut, bertambah pula lembaga yang memiliki program SPAB. Kesadaran akan pentingnya sekolah dan madrasah aman dari bencana juga semakin meningkat.

Telah banyak capaian yang sudah kita peroleh dalam mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Saat ini kita sudah memiliki peta jalan (*road map*) sekolah aman, sekretariat nasional untuk mengkoordinasikan implementasi satuan pendidikan aman bencana, serta dasar kebijakan dan panduan yang dapat dipedomani bersama. Implementasi yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun berbagai lembaga non pemerintah, juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu *safe school country leader* diantara 15 negara lain di dunia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia telah menjadi pelopor SPAB dengan melakukan berbagai upaya yang inovatif dan strategis.

Dalam menumbuhkembangkan SPAB secara optimal, ada beberapa hal yang masih perlu diperkuat, antara lain meningkatkan koordinasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya, mengimplementasikan kebijakan dan strategi secara efektif, melakukan *monitoring* dan evaluasi secara terpadu, sistematis dan berkala.

Semoga buku ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan pembelajaran kebencanaan bagi berbagai pelaku satuan pendidikan aman bencana baik di Indonesia maupun di mancanegara yang pada akhirnya kita semua dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengurangan risiko bencana.

Jakarta, Oktober 2017



Willem Rampangilei

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

2 Kata **Pengantar**

3 Daftar **Isi**

5 Daftar **Singkatan**

7 Bab 1 **Ancaman Bencana di Satuan Pendidikan**

8 Bahaya bencana di Indonesia

9 Apa yang dimaksud dengan bencana?

10 Kerugian yang diakibatkan bencana

16 Dampak bencana terhadap sektor pendidikan di Indonesia

18 Pemetaan sekolah di daerah rawan bencana

19 Peta indeks risiko bencana Indonesia

23 Bab 2 **Program Satuan Pendidikan Aman Bencana**

24 Konsep dasar

28 Sejarah Pendidikan Tangguh Bencana

30 Sejarah istilah program PRB di sektor pendidikan

31 10 Langkah mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana

32 Regulasi & Juknis

34 Kelembagaan

37 Anggaran dari Pemerintah

39 Bab 3 **Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana**

40 Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana

41 Kegiatan penunjang keberhasilan impelemnatasi SPAB di daerah

43 Roadmap sekolah/ madrasah aman

45 Bab 4 **Tantangan & Peluang penerapan SPAB**

DAFTAR ISI

55 Bab 5 **Media Komunikasi Informasi Edukasi**

57 Poster

58 Komik

59 Brosur
Buku Panduan

60 Lembar Balik Video

61 Alat Permainan (Konvesional, Elektronik)

63 Bab 6 **Pendidikan Tangguh Bencana di Tahun 2030**

62 Alat Peraga

64 Deklarasi Magelang 2017

65 Kebijakan dan peraturan mengenai satuan pendidikan aman bencana telah disahkan dan diterapkan secara optimal

67 Seknas berjalan maksimal termasuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta

69 Materi SPAB termasuk bagian dari kompetensi guru dan tenaga kependidikan bisa diakses pula melalui e-learning

70 1% dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk SPAB

71 Juknis terkait alokasi dana dari BOS dipahami oleh seluruh guru, tenaga kependidikan, dan sekolah mengalokasikan anggaran SPAB dari dana BOS

72 Pemantauan implementasi SPAB terintegrasi di dapodik

73 Audit keamanan bangunan secara berkala

74 Simulasi rutin di sekolah dua kali setahun

75 Kolaborasi antar kementerian dengan multipihak berjalan optimal

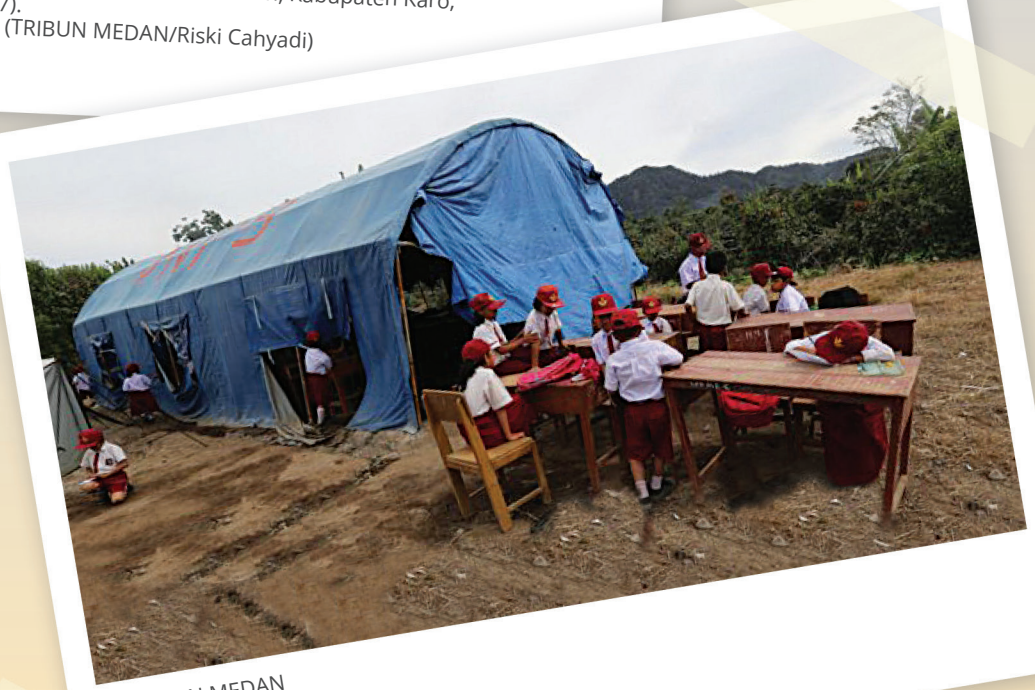
76 Daftar **Pustaka**

DAFTAR SINGKATAN

AEPI : Australia's Education Partnership with Indonesia
ASB : Arbeiter-Samariter-Bund
APAR : Alat Pemadam Api Ringan
Bakornas PB : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
BOS : Bantuan Operasional Sekolah
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAPODIK : Data Pokok Pendidikan
Ditjen : Direktorat Jenderal
Dikdasmen : Pendidikan Dasar dan Menengah
EMIS : Education Management Information System
GIS : Geographic Information System
HFI : Humanitarian Forum Indonesia
Juknis : Petunjuk Teknis
Kemenag : Kementerian Agama
Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepmendikbud : Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkes : Kementerian Kesehatan
Kemenristekdikti : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemensos : Kementerian Sosial
KRB : Kajian Risiko Bencana
KerLiP : Keluarga Peduli Pendidikan
KPB : Konsorsium Pendidikan Bencana
KYPA : Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh
LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPBI NU : Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Indonesia Nahdhatul Ulama
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MA : Madrasah Aliyah
MDMC : Muhammadiyah Disaster Management Center
MI : Madrasah Ibtidaiyah
MTs : Madrasah Tsanawiyah
Monev : Monitoring dan Evaluasi
MoU : Memorandum of Understanding
PAUD : Pendidikan Anak Usia DIni
Perbup : Peraturan Bupati
Pergub : Peraturan Gubernur
Perka : Peraturan Kepala
Permendikbud : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendiknas : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Perpres : Peraturan Presiden
PG : Playgroup
PKLK : Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
PP : Peraturan Pemerintah
PRB : Pengurangan Risiko Bencana
RKAS : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
Satgas : Satuan Tugas
SD : Sekolah Dasar
SE : Surat Edaran
Sekjen : Sekretaris jenderal
Seknas : Sekretariat Nasional
SK : Surat Keputusan
SNI : Standar Nasional Indonesia
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMAB : Sekolah/Madrasah Aman Bencana
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SPAB : Satuan Pendidikan Aman Bencana
SSB : Sekolah Siaga Bencana
TK : Taman Kanak-kanak
UNDP : United Nations Development Programme
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF : United Nations Children's Fund
UN OCHA : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UU : Undang-Undang
VISUS : Visual Inspection for defining the Safety Upgrading Strategies
WVI : Wahana Visi Indonesia
YKRI : Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia
YSTC : Yayasan Sayangi Tunas Cilik



SD Negeri 044831 Desa Gung Pinto, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (18/7/2017).
© TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (TRIBUN MEDAN/Riski Cahyadi)



© TRIBUN MEDAN

BAB 1

ANCAMAN BENCANA
DI SATUAN PENDIDIKAN

BAHAYA BENCANA DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memiliki **gunung api aktif terbanyak di dunia, 127 buah,** dimana beberapa diantaranya merupakan letusan gunung api terkuat yang pernah terjadi di dunia.





Gempa bumi

Indonesia juga merupakan daerah rawan gempa bumi **karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.**

Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang juga menyebabkan sebagian besar kawasan pesisir **pantai Indonesia rawan terlanda tsunami.**



TSUNAMI



Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang menyebabkan sering terjadi **banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan** serta **abrasi dan gelombang ekstrim** di beberapa wilayah Indonesia.
Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan Indonesia berpotensi akan ancaman **kecelakaan industri** dan **wabah penyakit**



APA YANG DIMAKSUD DENGAN BENCANA?

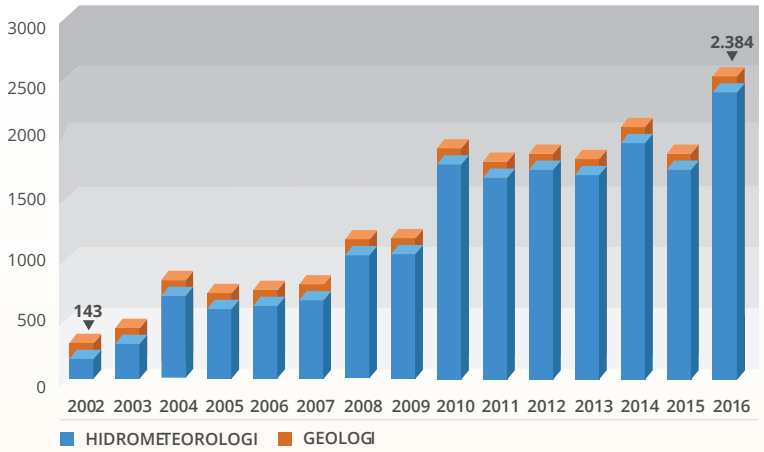
Bencana adalah suatu **kejadian atau rangkaian kejadian** yang menyebabkan banyak **kematian atau kerugian yang luar biasa** dimana masyarakat **membutuhkan bantuan dari pihak luar.**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007).

Kejadian bencana bisa dipicu oleh peristiwa alam, tindakan manusia atau kombinasi keduanya.

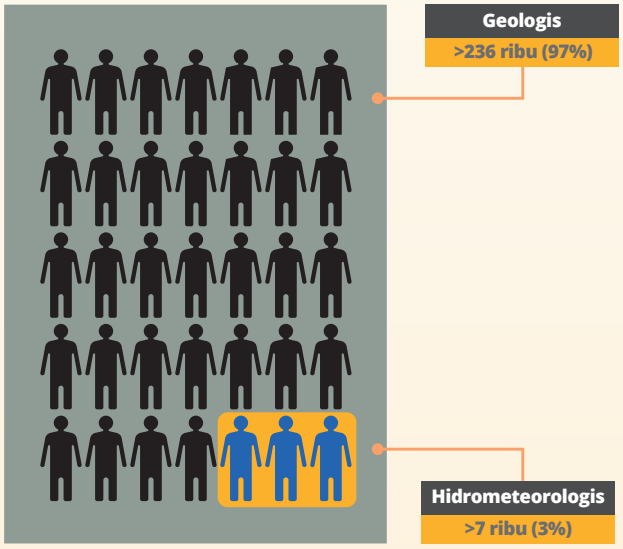


JUMLAH KEJADIAN BENCANA

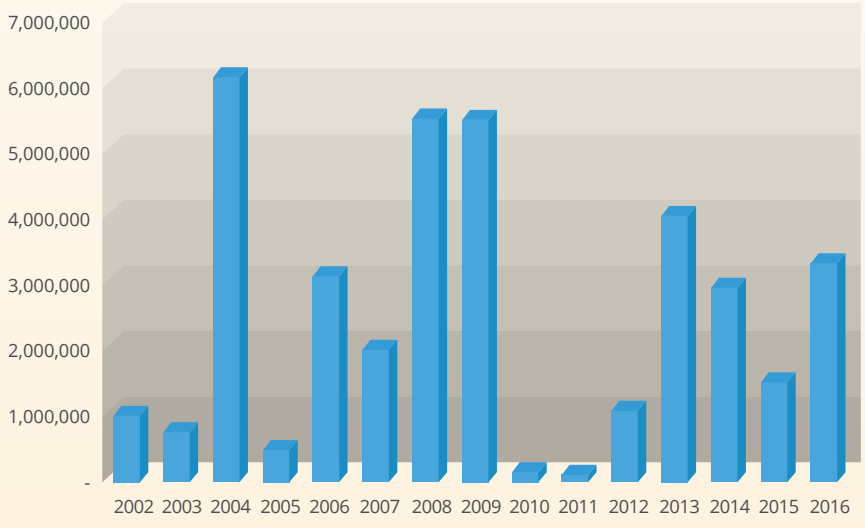


Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2017) dalam 15 tahun terakhir (2002 - 2016), jumlah kejadian bencana diIndonesia meningkat hampir 20 kali lipat. Jenis bencana bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, gelombang pasang/ abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan angin puting beliung) dan geologis (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api).
Lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor, dimana lebih dari 28 juta orang terkena dampak antara 2002-2016. Namun, berdasarkan jumlah korban jiwa, bencana terkait geologi adalah jenis bencana yang paling mematikan, dimana lebih dari 90% korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami.

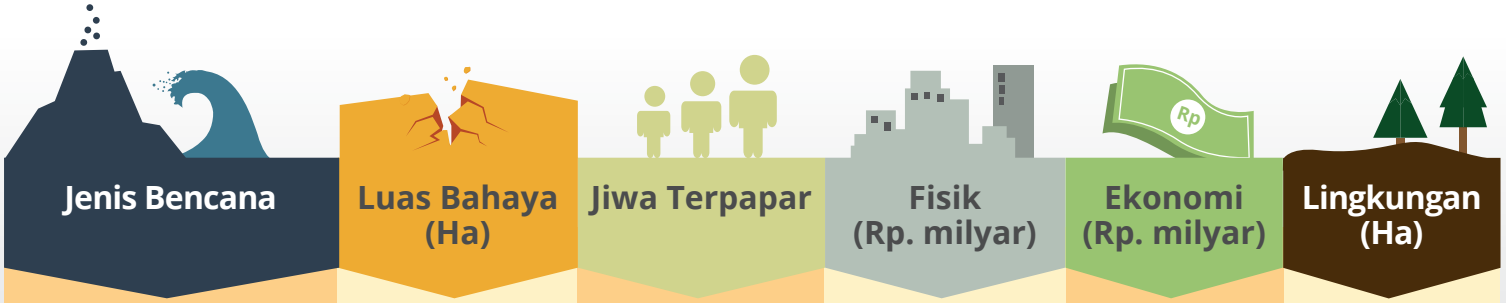
MENINGGAL DAN HILANG



JIWA TERDAMPAK



POTENSI TERPAPAR DAN KERUGIAN AKIBAT DAMPAK BENCANA



Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. milyar)	Ekonomi (Rp. milyar)	Lingkungan (Ha)
Banjir	39.371.167	100.814.666	176.329.821	140.520.440	12.135.975
Banjir Bandang	2.733.966	8.637.161	44.679.539	15.358.006	1.055.365
Cuaca Ekstrim	106.582.476	244.295.774	11.972.702	3.088.869	0
Gelombang Ekstrim & Abrasi	1.888.085	4.917.327	22.042.350	1.290.842	460.252
Gempa bumi	52.374.614	86.247.258	466.689.834	182.185.171	0
Kebakaran hutan & lahan	86.457.259	0	0	59.036.830	41.855.289
Kekeringan	163.101.784	228.163.266	0	192.737.143	63.781.004
Letusan Gunung Api	394.324	749.126	2.695.427	12.613	139.676
Tanah Longsor	57.418.460	14.131.542	78.279.825	75.870.343	41.337.707
Tsunami	961.133	3.702.702	71.494.821	7.976.358	119.688

Sumber data: BNPB, 2017

DAMPAK BENCANA TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dalam 15 tahun terakhir, terdapat 46.648 sekolah yang terdampak. Data ini hanya dihimpun berdasarkan skala bencana menengah dan besar yang memberikan dampak signifikan pada sektor pendidikan Indonesia.

2004 | Gempa bumi dan Tsunami | Aceh dan Sumatera Utara
2.000 sekolah



2006 | Gempa bumi | Yogyakarta
2.900 sekolah



2007 | Banjir | Jakarta
251 sekolah



2009 | Gempa bumi | Sumatera Barat dan Jambi
2.800 sekolah



2010 | Gempa bumi dan Tsunami | Mentawai
7 sekolah



2009 | Gempa bumi dan Tsunami | Jawa Barat
2.091 sekolah



2013 | Gempa bumi | Aceh Tengah dan Bener Meriah
514 sekolah



2014 | Banjir | Manado
55 sekolah



2015 | Asap | Sumatera dan Kalimantan
21.005 sekolah



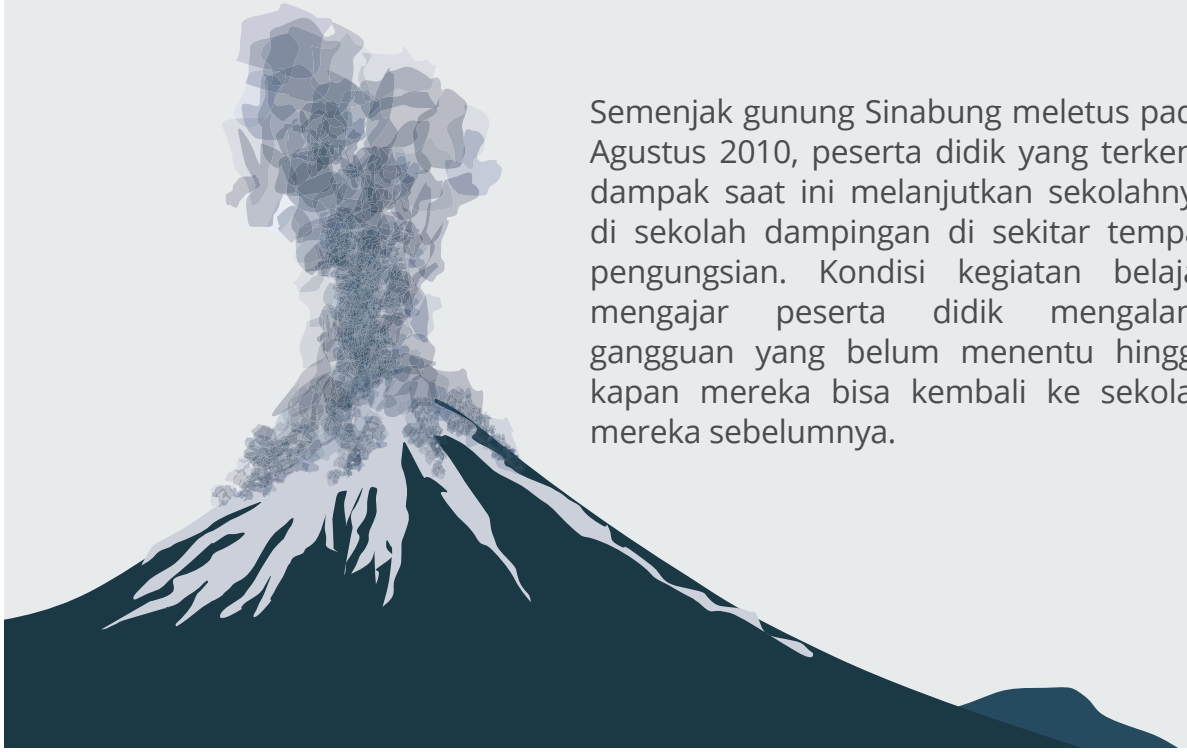
2016 | Gempa bumi | Pidie Jaya, Pidie dan Bireun
268 sekolah



LETUSAN GUNUNG BERAPI DI SINABUNG



© ANTARA NEWS 2014



Semenjak gunung Sinabung meletus pada Agustus 2010, peserta didik yang terkena dampak saat ini melanjutkan sekolahnya di sekolah dampingan di sekitar tempat pengungsian. Kondisi kegiatan belajar mengajar peserta didik mengalami gangguan yang belum menentu hingga kapan mereka bisa kembali ke sekolah mereka sebelumnya.

DAMPAK LETUSAN GUNUNG SINABUNG

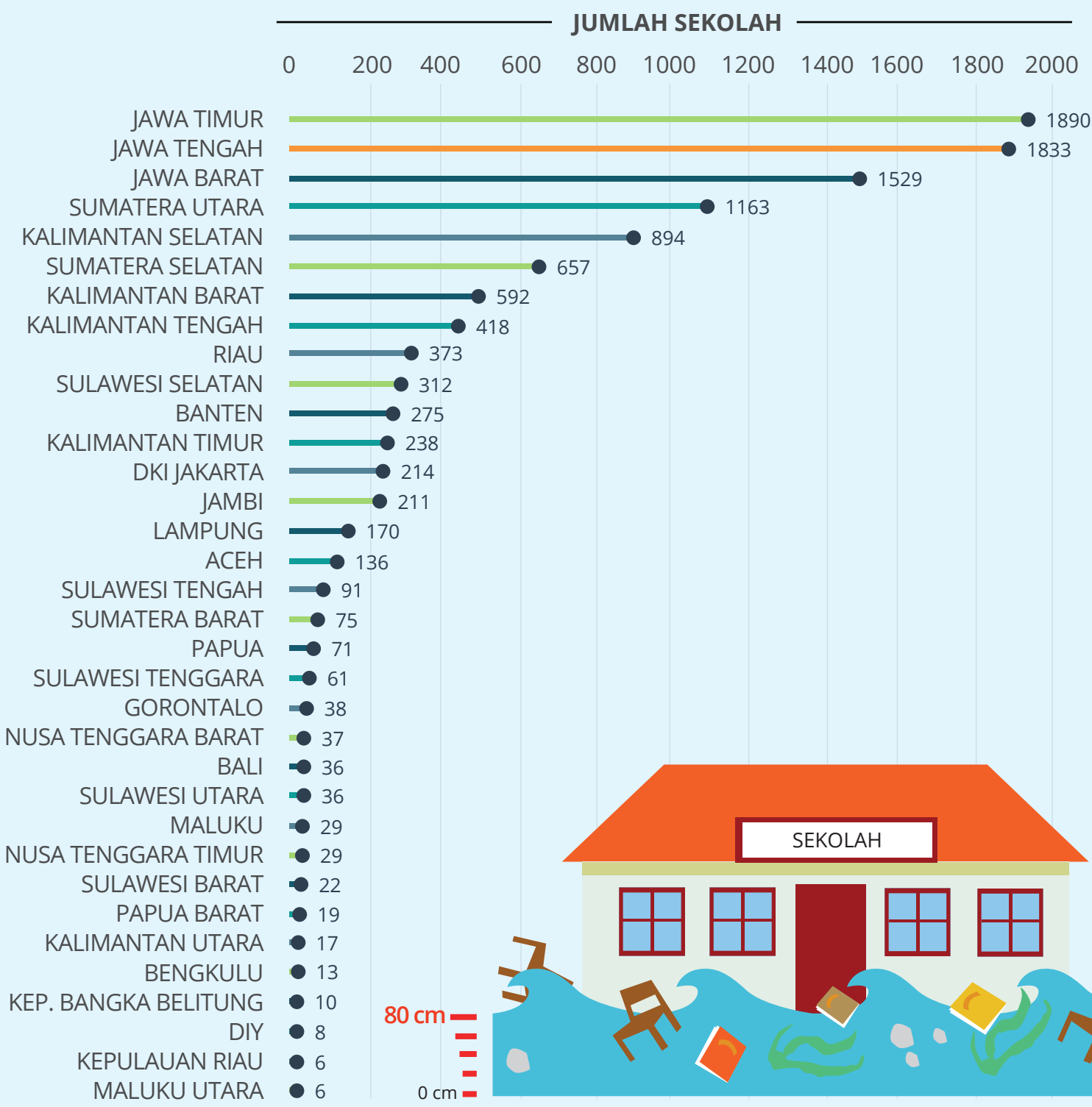
7
Km
radius KRB

1,49
Trilyun
Kerugian dan kerusakan

185
Sekolah rusak

6.179
Jiwa
mengungsi

2.856
Peserta didik
mengungsi



Sumber data: Kemendikbud, 2017

Jumlah sekolah di Wilayah Risiko Tinggi (>80cm) Bahaya Banjir.

BANJIR JAKARTA

Wilayah Jakarta merupakan daerah rawan banjir dan diperparah dengan tingginya urbanisasi dan pesatnya perubahan fungsi guna lahan.

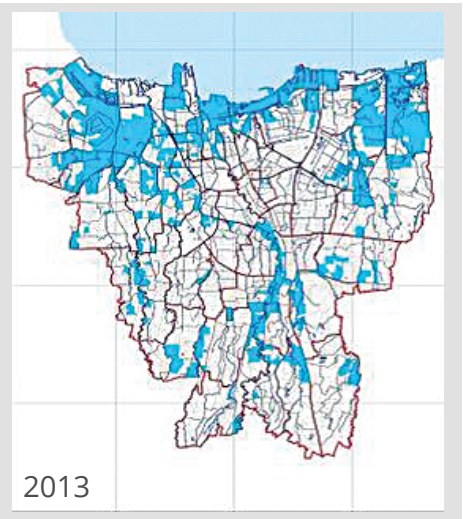
Banjir tahun 2013 yang terjadi di Jakarta merupakan salah satu banjir dengan sebaran terbesar dalam 15 tahun terakhir. Setidaknya ada 251 sekolah terdampak dengan jumlah peserta didik sebanyak 70.270 orang tidak bisa mengakses pendidikan selama 2 minggu.

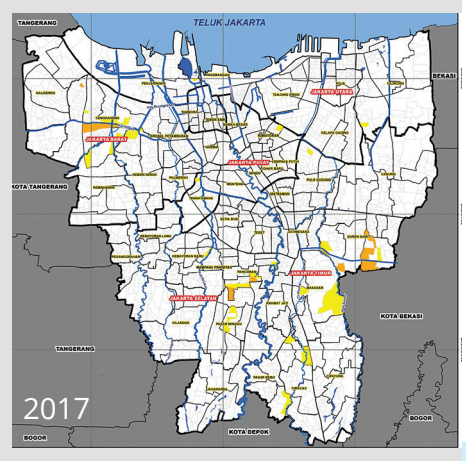
Banjir ini menyebabkan kerugian materi yang cukup besar termasuk merusak dan/atau menghilangkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pendidikan.

Berkat upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta keterlibatan masyarakat pada program pencegahan dan mitigasi banjir, pada tahun 2017 wilayah yang terkena banjir di Jakarta berkurang dengan signifikan.



Peta Daerah Terdampak Banjir DKI Jakarta





Sumber: BPBD DKI Jakarta, 2013, 2017

TSUNAMI ACEH





© YUSRA TEBE 2004

© ANTARA 2004

© YUSRA TEBE 2004

© OKEZONE.COM

Tsunami Aceh pada Desember 2004 merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dalam satu generasi terakhir. Sekitar 220 ribu orang meninggal (termasuk hilang) dan merusak 2000 sekolah. Kerusakan akibat tsunami begitu besarnya sehingga membutuhkan waktu lama untuk membangun ulang sekolah-sekolah yang rusak dan anak-anak mesti sekolah di ruang belajar darurat.

220 RIBU KORBAN TSUNAMI

Orang meninggal
(termasuk hilang)

BENCANA TERBESAR

yang pernah terjadi
di Indonesia dalam satu generasi terakhir.

2000 SEKOLAH RUSAK

GEMPA BUMI YOGYAKARTA 2006

57
DETIK

6.000
ORANG MENINGGAL

5,9
SKALA RICHTER

2.900
BANGUNAN SEKOLAH



Foto gempa Yogyakarta © Yusra Tebe 2006

Gempa bumi Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 pukul 05:55:03 WIB. Peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut berlangsung selama kurang lebih 57 detik berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Selain korban jiwa, gempa bumi tersebut juga merusak 2.900 bangunan sekolah.

Walaupun hampir 6.000 orang meninggal, banyak pihak berpendapat bahwa dampak gempa bumi ini bisa jauh lebih buruk. Hal ini karena gempa bumi terjadi di pagi hari dimana anak-anak belum berangkat ke sekolah. Bila gempa bumi ini terjadi saat jam sekolah, kemungkinan jumlah korban jiwa bisa jauh lebih besar.

PEMETAAN SEKOLAH DI DAERAH YANG RAWAN BENCANA

497.576
TOTAL SEKOLAH DI INDONESIA

TERSEBAR DI **34** PROVINSI

RINCIANNYA TERDIRI DARI







229,533
TK/RA/KB/TPA/SPS

174.249
SD/MI

57.499
SMP/MTs

22.439
SMA/MA

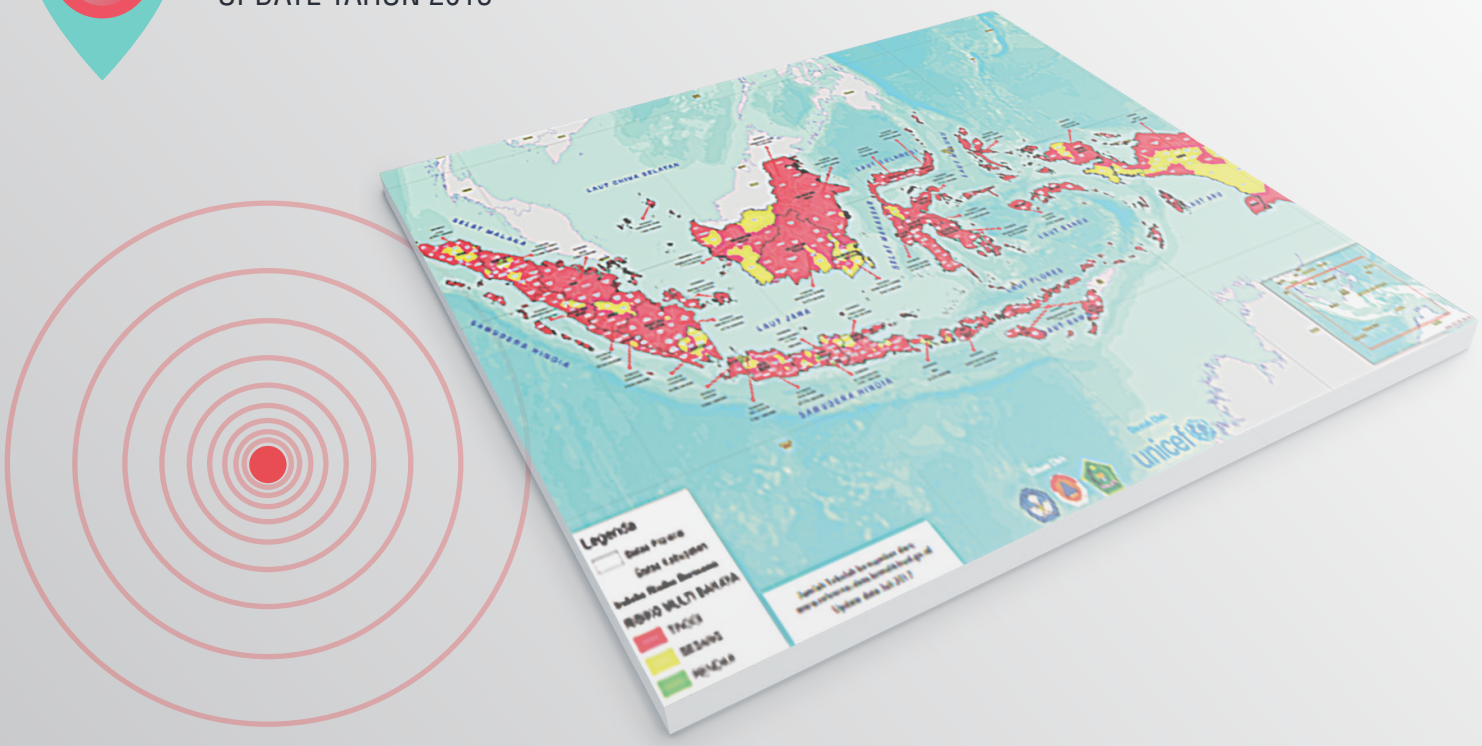
13.856
SMK

Data tersebut pada tahun 2013 disandingkan dengan peta indeks risiko bencana di Indonesia oleh BNPB.

Sumber: Kemendikbud, 2017

PETA INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA

UPDATE TAHUN 2013



Saat ini proses pemetaan sekolah yang berlokasi di daerah rawan bencana sedang dilakukan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan BNPB. Hasil pemetaan dapat dilihat di website: smab.kemdikbud.go.id

250.000

JUMLAH SEKOLAH SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK YANG BERADA DI LOKASI RAWAN BENCANA

ATAU

75%

DARI SELURUH SEKOLAH DI INDONESIA

Sekolah di lokasi rawan bencana sedang dan tinggi

Sumber: Worldbank, 2014



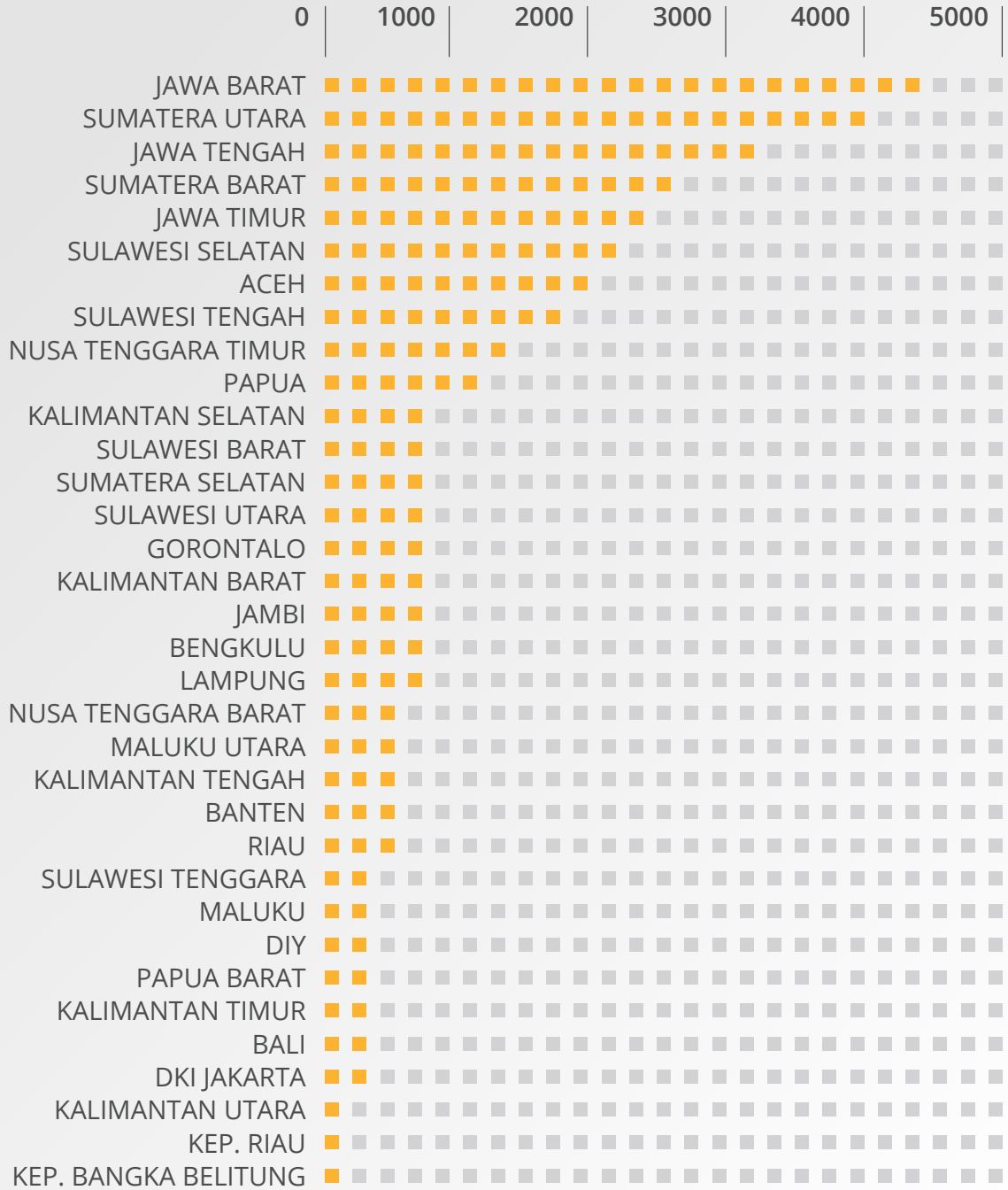
JUMLAH SEKOLAH DAN RUANG KELAS YANG RUSAK BERAT, RUSAK SEDANG, RUSAK RINGAN

DATA KEMENDIKBUD **AGUSTUS 2017**

- **266.599** SEKOLAH
- **1.701.302** RUANG KELAS
  - **472.504** RUANGAN YANG KONDISINYA BAIK DAN KONDUSIF UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
  - **940.993** RUSAK RINGAN
    - **99.018** RUSAK SEDANG
    - **74.855** RUSAK TOTAL
  - **79.526** RUSAK BERAT
  - **34.406** RUANGAN BUKAN MILIK

Angka yang besar ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat bila bahaya bencana terjadi misalnya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang, kelas-kelas ini tentunya dapat membahayakan peserta didik dan guru didalamnya.

SEBARAN JUMLAH SEKOLAH YANG BERADA DI WILAYAH ANCAMAN TINGGI BENCANA





TOTAL SEBANYAK

250.000

- **SEKOLAH DI WILAYAH RISIKO TINGGI MULTI BAHAYA**

GEMPA BUMI
LETUSAN GUNUNG API
TSUNAMI
BANJIR
LONGSOR

Sumber: Kemendikbud, 2017



Dokumentasi KYPA, 2014

BAB 2

PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

A. KONSEP DASAR

Mewujudkan pendidikan tangguh bencana memerlukan upaya-upaya yang komprehensif yang **berpusat pada anak.**

Berpusat pada anak
adalah seluruh upaya dilakukan dengan memahami bahwa anak-anak memiliki kebutuhan yang spesifik dalam menghadapi bahaya bencana serta seluruh upaya tersebut dilakukan dengan mengajak anak-anak untuk ikut serta berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitas dan minatnya.

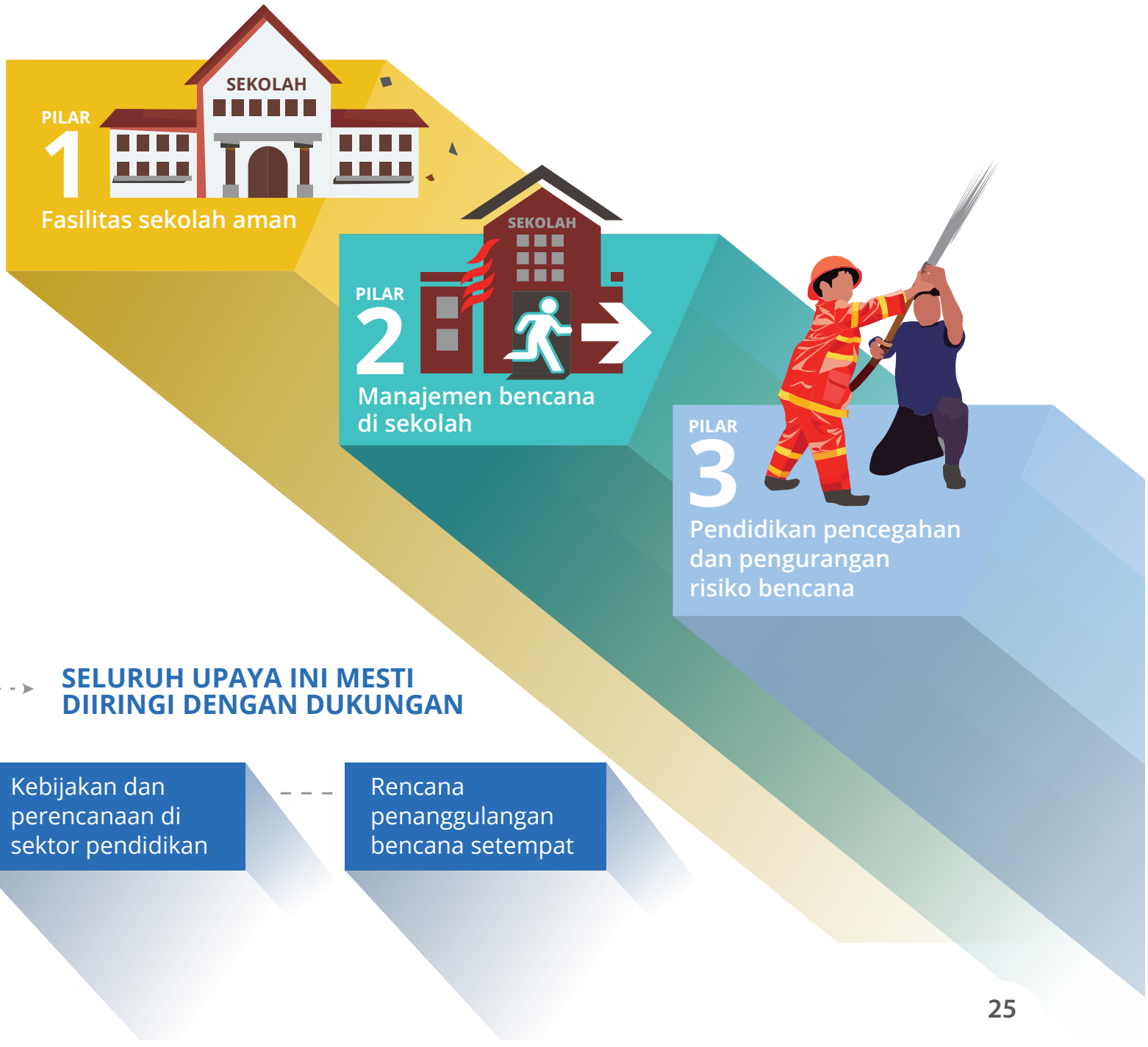


Dokumentasi YSTC, 2017



Dokumentasi PLAN - LIPI, 2014

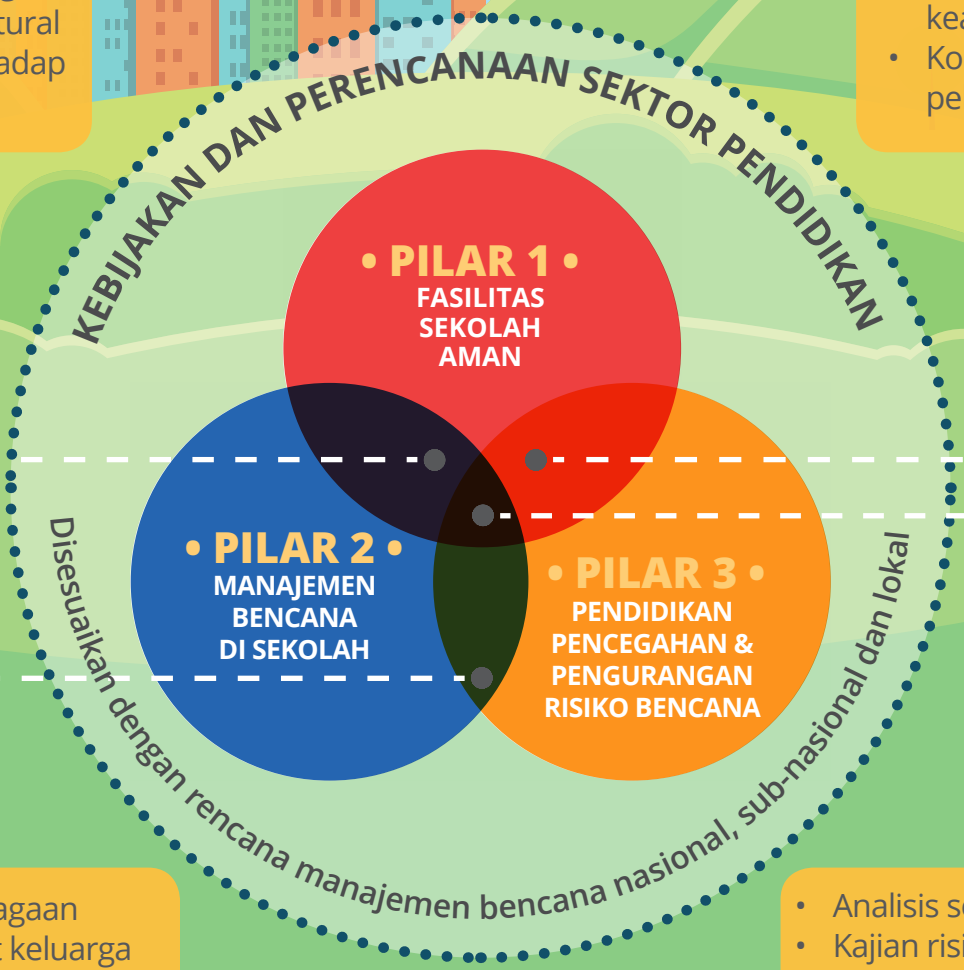
UPAYA-UPAYA PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA DIKELOMPOKKAN MENJADI TIGA KOMPONEN



PENDEKATAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA YANG KOMPREHENSIF

- Perawatan Gedung
- Miligasi non-struktural
- Keselamatan terhadap kebakaran

- Pendidikan akan keamanan struktural
- Konstruksi sebagai peluang pendidikan



- Rencana kesiapsiagaan bencana ditingkat keluarga
- Rencana reunifikasi keluarga
- Latihan (Simulasi) sekolah

- Analisis sektor pendidikan
- Kajian risiko multi bahaya
- Kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak

Kegiatan yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam rangka implementasi SPAB:



Kegiatannya meliputi

- Penempatan lokasi Sekolah di wilayah yang bukan rawan Bencana
- Desain dan pembangunan bangunan Sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan
- Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Sekolah dan fasilitasnya di paska bencana
- Perkuatan (retrofiting) bangunan Sekolah untuk aman dari bahaya Bencana
- Melakukan perawatan sarana dan prasarana pendidikan
- Melakukan penataan ruang kelas agar aman di saat ancaman bencana terjadi
- Pengadaan fasilitas pendukung seperti adanya perlengkapan tanggap darurat di setiap ruangan, alat pemadam kebakaran, kotak pertolongan pertama dan juga alarm/ tanda untuk evakuasi
- Pengawasan secara berkala mengenai keamanan gedung sekolah oleh instansi terkait
- Pendidikan mengenai bangunan aman bencana

Kegiatannya meliputi

- Pembentukan tim penanggulangan bencana di sekolah
- Penetapan Kebijakan SPAB di sekolah/madrasah
- Perencanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah dalam bentuk prosedur tetap dan rencana kontinjensi
- Pengembangan strategi belajar mengajar di masa darurat
- Penyusunan rencana aksi untuk mendukung SPAB
- Penentuan rencana pertemuan kembali antara anak dan orang tua bila terjadi bencana

Kegiatannya meliputi

- Peningkatan kapasitas bagi warga sekolah (kepala sekolah, guru, komite, siswa dan tenaga kependidikan lainnya) dan pengawas sekolah
- Praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan
- Integrasi materi PRB dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakulikuler (contoh: pramuka, dokter kecil, palang merah remaja)
- Kampaye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis

B. SEJARAH PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA




2011
Adopsi Standar Minimum Pendidikan di Masa Darurat dalam konsep Pendidikan Ramah Anak
2011
Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah dicanangkan
2011
Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah
2011
Pemodelan penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana
2012
Perka BNPB no. 4/ 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana
2012
Piloting SMAB di 210 sekolah di lima provinsi
2012
Penerapan SMAB dalam rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah
2013
Pendidikan di masa darurat resmi dimasukkan ke dalam bidang Pendidikan Layanan Khusus (Permendikbud no.72/ 2013)
2013
Integrasi sekolah aman bencana dengan Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Ramah Anak
2013
Direktori SMAB disusun. Lebih dari 25,000 sekolah telah terpapar program terkait SMAB
2014
Integrasi bangunan tahan gempa ke dalam petunjuk teknis DAK SMP
2014
Sekretarian Nasional Sekolah Aman dialihkan koordinasinya dari BNPB kepada Kemendikbud
2014
Sekolah/ Madrasah Aman Bencana menjadi bagian dari Sekolah Ramah Anak (Permeneg PPPA no. 8/ 2014)
2015
Roadmap sekolah aman ditetapkan
2017
Seknas SPAB dibentuk melalui SK Kemendikbud
2017
Proses penyusunan draft Permendikbud tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dimulai
2017
Deklarasi Magelang ditetapkan sesudah Konferensi Nasional Pendidikan Bencana

C. SEJARAH ISTILAH PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKTOR PENDIDIKAN

Program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan sudah berjalan lebih dari satu dekade. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan non-pemerintah. Meskipun memiliki nama yang berbeda, tujuan program ini adalah sama yaitu untuk menyelamatkan jiwa warga sekolah terutama anak-anak dari ancaman bencana. Beberapa istilah yang digunakan antara lain:



Beberapa istilah masih digunakan terkait dengan komitmen lembaga terhadap implementasi program yang sedang berjalan.

Namun, saat ini istilah resmi yang digunakan adalah **Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),** yang menunjukkan komitmen penuh Pemerintah Indonesia, dibawah koordinasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan seluruh fasilitas pendidikan beserta warganya agar aman dari ancaman bencana, yang terdiri dari PAUD, PG, TK, SD/ MI, SMP/ MTS, SMA/ SMK/ MA, dan fasilitas pendidikan lainnya. Dalam buku ini terdapat beberapa istilah lama yang masih digunakan yang pengertiannya sama dengan SPAB.

D.10 LANGKAH MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah merupakan tujuan dari program sekolah aman bencana. Dalam implementasinya, program sekolah aman bencana dapat diintegrasikan dengan berbagai sektor yang bergerak di bidang pendidikan dan kebencanaan. Berikut adalah ruang lingkup pelaksanaan sekolah aman bencana yang meliputi sepuluh kegiatan:

1. Persiapan dan konsolidasi dengan pihak Sekolah
2. Pengkajian dan penilaian mandiri di awal program
3. Pelatihan untuk guru, tenaga kependidikan lainnya, serta komite sekolah
4. Pelatihan untuk peserta Didik
5. Pengkajian risiko bencana bersama, termasuk dengan peserta didik
6. Penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana Sekolah
7. Penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat, dan paska bencana
8. Melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali setahun
9. Melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan memutakhirkan rencana aksi

Pada umumnya, program SPAB dapat dikerjakan dalam periode 3-4 bulan di tiap sekolah.

E. REGULASI & JUKNIS

Dasar hukum penyelenggaraan SPAB secara umum telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya yaitu:

1 UU 20/2003	tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 2 tentang pendidikan layanan khusus
2 UU 24/2007	tentang Penanggulangan Bencana pasal 26, 35, 43 dan 47
3 UU 23/2002 yang diperbaharui dengan UU 35/2014	tentang Perlindungan Anak
4 UU 8/2016 Penyandang Disabilitas Bagian ke enam belas pasal 20	tentang Hak Perlindungan dari bencana dan Pasal 109 tentang pelayanan publik perlindungan dari bencana
5 PP 17/2010	tentang Penyelenggaraan Pedidikan
6 PP 32/2013	tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan kedua dari PP 19/2005

7 Permendiknas 24/2007	tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah (SD/ MI), Sekolah menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8 SE Mendiknas 70a/MPN/SE/2010	tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah
9 Perka BNPB 4/2012	tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana
10 Permendikbud 72/2013	tentang Pendidikan Layanan Khusus
11 SK Sekjen Kemendikbud 8953/A.A2.1/ KP/2014	tentang Sekretariat Penanggulangan Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12 Kepmendikbud 40/P/2017 yang diperbaharui dengan nomor 110/P/2017	tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

F. KELEMBAGAAN

- **Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Sekretariat Nasional Sekolah Aman Bencana dibentuk pada tanggal 25 Agustus 2011 yang awalnya bertujuan mewujudkan gerakan Aman, Sehat, Hijau, Inklusi dan Ramah Anak di sekolah dan madrasah yang melibatkan peran serta pemangku kebijakan, pengelola satuan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, keluarga/masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Yang turut dibentuk oleh berbagai lembaga Pemerintah dan non pemerintah.

Sejak 20 juni 2013, berdasarkan kordinasi BNPB, Kemenag, Kemdagri dan KemPU, dan KemKes, maka disepakati pengelolaan Seknas SMAB dialihkan ke BNPB dalam koordinasi Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. Namun pada peringatan bulan PRB tahun 2014, pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mulai tahun 2016, Seknas SMAB kelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit. PPKLK) dengan landasan kebijakan Permendikbud 11/2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kemendikbug tentang Pendidikan layanan khusus dalam hal ini pendidikan di daerah rawan bencana alam dan sosial. Kemudian pada tanggal 19 mei 2017, Seknas ditetapkan melalui keputusan nomor 40/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB)

Seknas SPAB bersifat ad-hoc, kerja tim, dinamis, fleksibel, serta sebagai pemegang mandat fasilitasi operasionalisasi kebijakan penerapan sekolah/ madrasah aman bencana. Seknas SPAB terdiri dari lintas sektoral (Kementerian/ Lembaga/ Instansi) dengan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung dan secara fungsional dari jabatan yang melekat dalam rangka menyukseskan program dan target penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana. Seknas SPAB dilandaskan pada prinsip-prinsip pedoman penerapan dasar dari bencana.

Secara khusus, Seknas SPAB lebih mempertimbangkan pada tiga prinsip utama, sebagai berikut:

1. **Berbasis Hak.** Penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana harus didasari sebagai pemenuhan hak pendidikan anak;

2. **Interdisiplin dan Menyeluruh.** Penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan dan dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai standar nasional pendidikan;

3. **Komunikasi Antar-Budaya (Intercultural Approach).** Pendekatan penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosioekonomi) sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai–nilai luhur kemanusiaan.

SEKNAS SPAB MEMPUNYAI TUGAS:

1. Melakukan **pemetaan program sekolah aman bencana** pada saat tidak terjadi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana baik yang menjadi tanggungjawab unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak eksternal.
2. Mengkoordinasikan **pelaksanaan rencana aksi** program sekolah aman bencana 2015 – 2019.
3. **Mengkoordinasikan hal-hal terkait program dan kegiatan sekolah aman bencana** antar unit utama Kemendikbud dengan pihak eksternal antara lain kementerian lain dan lembaga non pemerintah nasional/internasional penggiat kebencanaan pada masa pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Melakukan **pendampingan teknis** penerapan sekolah aman bencana kepada multi pihak dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, penyusunan petunjuk teknis dan lain sebagainya
5. Mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan **praktik baik, sumber pengetahuan dan media komunikasi informasi dan edukasi** terkait sekolah aman bencana di Indonesia.
6. Melakukan **evaluasi pelaksanaan program** pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibidang pendidikan.
7. Menyusun **laporan kemajuan** pelaksanaan penerapan sekolah aman bencana.

STRATEGI SEKNAS SPAB:

1. Terciptanya koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta).
2. Tersedianya dan terintegrasinya data, informasi satuan pendidikan aman bencana.
3. Tersedianya akses informasi yang berkualitas.
4. Terwujudnya penguatan dan pemberdayaan warga sekolah dalam penerapan satuan pendidikan aman bencana yang berkelanjutan

Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah

Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan

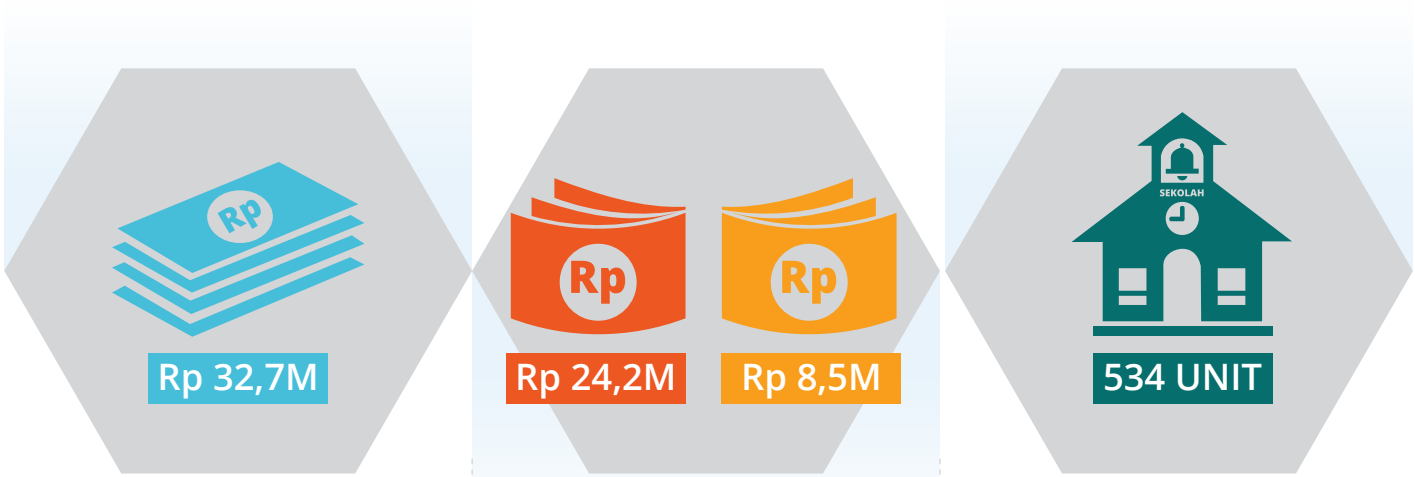
Satgas pendidikan dibentuk untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai aktivitas terkait dengan pendidikan dalam situasi bencana, termasuk penguatan kesiapsiagaan dan koordinasi untuk peningkatan kapasitas teknis, dalam masa tanggap darurat. Satgas Pendidikan di Indonesia, dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), dengan dukungan dari Unicef. Pada level internasional satgas ini lebih dikenal dengan istilah *Education cluster* (kluster pendidikan), yang dipimpin bersama antara Unicef dan Save the Children.

Sekilas mengenai KPB

Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) Indonesia dibentuk pada bulan Oktober 2006 sebagai tindak lanjut dari Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana (Internasional) 2006 dengan tema "Pengurangan Risiko Bencana Mulai dari Sekolah". Pada Oktober 2017, KPB beranggotakan sebanyak 35 lembaga baik nasional maupun internasional. Dalam mewujudkan komitmen SPAB di Indonesia yang selaras dengan pelaksanaan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, maka KPB terus mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan PRB di tingkat daerah, nasional dan internasional yang berkelanjutan baik formal, non-formal, maupun informal melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antar pihak yang berkomitmen dalam pendidikan pengurangan risiko bencana.

G. ANGGARAN PEMERINTAH

Hingga saat ini, komitmen pendanaan pemerintah terutama Kemendikbud dan BNPB untuk kegiatan SPAB adalah sebesar:



TOTAL ANGGARAN DARI PEMERINTAH YANG KHUSUS UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA, YANG MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN.

JUMLAH ANGGARAN

KEMENDIKBUD	BNPB
(2012-2017)	(2015-2017)

JUMLAH SEKOLAH



Sekolah yang sudah mengikuti program SPAB di seluruh Indonesia yang didukung oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah.
(Sumber: BNPB, 2013)

Jumlah ini sangat lah kecil (<5%) dibandingkan jumlah keseluruhan sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu melibatkan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh sekolah di Indonesia bisa aman dari risiko bencana.

Data ini bersumber dari data Seknas SPAB yang didapat dari berbagai informasi. Ada kemungkinan pula kontribusi dari Kementerian atau lembaga lainnya yang mendukung program SPAB namun tidak tercatat oleh Seknas SPAB.





Dokumentasi YSTC, 2017



Dokumentasi YSTC, 2017

BAB 3

PENERAPAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA



IMPLEMENTASI SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA (SPAB)

Penerapan SPAB difokuskan pada penerapan tiga pilar/komponen satuan pendidikan aman bencana. Untuk menunjang keberhasilan implementasi SPAB, sekretariat nasional SPAB bermitra dengan lembaga penggiat PRB dalam melaksanakan program SPAB.
Prinsip-prinsip utama yang mesti diterapkan saat menjalankan program SPAB adalah:

- Berpusat pada anak, dimana anak dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta seluruh tindakan berdasarkan kebutuhan spesifik anak
- Kegiatan dimulai dengan melakukan kajian risiko yang melibatkan seluruh pihak Sekolah, termasuk anak-anak
- Sejalan dengan kebijakan dan perencanaan sektor pendidikan serta selaras dengan rencana penanggulangan bencana di daerah setempat

KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SPAB DI BERBAGAI DAERAH

- Penetapan kebijakan dan peraturan yang jelas baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Pembentukan Seknas SPAB ditingkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi dan kemitraan antar pihak (pemerintah, LSM, akademisi/universitas, pihak swasta, dan masyarakat).
- Penguatan kerja sama antara dinas pendidikan setempat dan badan penanggulangan bencana daerah.
- Penyediaan tenaga pendamping untuk SPAB untuk pelatihan/penyuluhan serta pengawasan.
- Pengembangan data dan informasi terkait dengan kajian risiko sekolah
- Kegiatan kampanye rutin untuk penyadaran dan kampanye misalnya lomba, simulasi evakuasi, seminar, konferensi, dan pameran-pameran terutama dalam kegiatan Bulan PRB (setiap bulan Oktober), Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (setiap 26 April), Hari Anak Nasional (setiap 23 Juli), Hari Disabilitas Sedunia (setiap 3 Desember), Hari Kepedulian Tsunami Sedunia (setiap 5 November).
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPAB bersama seluruh mitra pelaksana melalui rapat koordinasi dan inspeksi lapangan yang rutin.
- Pelaksanaan penelitian dan riset terkait SPAB

KEBERHASILAN

Adanya pesan kunci keselamatan yang terstandar di sekolah

Pesan PRB terstandar ditujukan untuk memberikan pesan yang konsisten kepada sekolah terkait PRB sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Pesan keselamatan disampaikan dalam berbagai bentuk media komunikasi informasi dan edukasi (poster, modul, film, dan alat peraga lainnya).

Adanya komitmen lembaga sekolah dan pemerintah

Peran pemerintah terhadap pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait PRB sangat penting. Penguatan kapasitas di sektor pendidikan baik sekolah dan pemerintah diperlukan dalam memantau pelaksanaan SPAB di daerah. Komitmen ini dalam bentuk program, anggaran dan sumberdaya manusia.

Adanya sinergi praktik PRB sekolah dengan PRB berbasis masyarakat

Bencana berdampak kepada sekolah dan masyarakat dalam waktu bersamaan, tidak terpisah. Diseminasi informasi dan praktik PRB di sekolah dapat dilanjutkan untuk tingkatan masyarakat yang dapat dilakukan oleh perwakilan komite sekolah . Hal ini telah mendukung adanya inisiatif PRB berbasis masyarakat yang ada di sekitar sekolah.

PRB sekolah yang inklusif

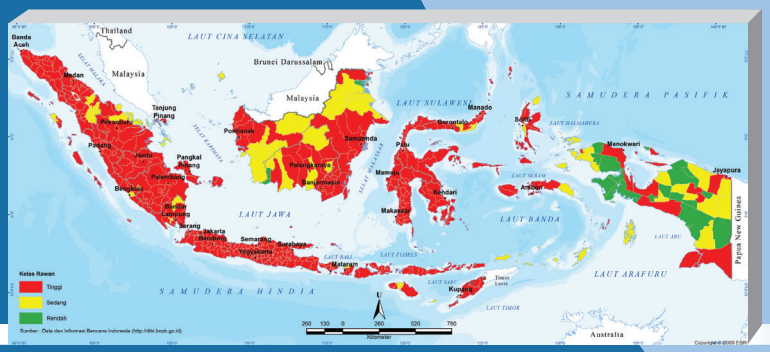
PRB inklusif tidak berfokus pada pelabelan/ klasifikasi anak melainkan pada kebutuhan dan kapasitas anak. Sekolah dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas belajar peserta didik yang berbeda-beda dalam menyerap pengetahuan dan praktik PRB. Sehingga informasi yang diberikan dapat diterima untuk melakukan sebuah aksi/tindakan.

Pengembangan strategi PRB sekolah yang praktis dan realistis.

Adanya pelaksanaan SPAB yang mandiri di sekolah dan perencanaan kegiatan yang relevan di sektor pendidikan tingkat daerah guna keberlanjutan program.

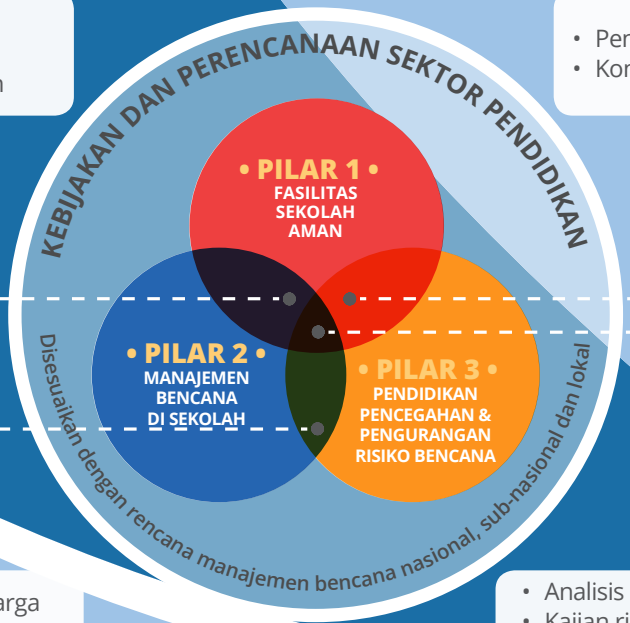
ROADMAP SEKOLAH / MADRASAH AMAN

PETA INDEKS RAWAN BENCANA INDONESIA TAHUN 2012



- Perawatan Gedung
- Miligasi non-struktural
- Keselamatan terhadap kebakaran

- Pendidikan akan keamanan struktural
- Konstruksi sebagai peluang pendidikan



- Rencana bencana di tingkat keluarga
- Rencana reunifikasi keluarga
- Latihan (Simulasi) sekolah

- Analisis sektor pendidikan
- Kajian risiko multi bahaya
- Kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD



Dokumentasi Yusra Tebe, 2017



Dokumentasi Kerlip, 2016

BAB 4

TANTANGAN & PELUANG
PENERAPAN SPAB

Program terkait pendidikan tangguh bencana di Indonesia sudah berjalan semenjak tahun 2005. Banyak hal yang sudah dilaksanakan dan berbagai strategi telah diterapkan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasi program SPAB, berdasarkan informasi dari lembaga-lembaga yang menjalankan program ini.

01



Masih sedikit orang-orang di sektor pendidikan yang belum mengetahui program SPAB dan bagaimana cara menerapkannya. Panduan untuk menerapkan SPAB baru disusun dan didukung oleh Kementerian terkait dalam tiga tahun terakhir dan sosialisasinya masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat, khususnya komunitas pendidikan bisa mendapatkan manfaat bila mengetahui adanya panduan ini.

Saat ini panduan ini bisa diunduh di website SPAB (www.smab.kemdikbud.go.id).

02

Lemahnya dukungan lembaga pemerintahan di tingkat daerah terhadap implementasi SPAB yang telah diinisiasi oleh BNPB, BPBD maupun pihak lainnya.

Sampai saat ini, daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan SPAB masih bisa dihitung dengan jari.

Hal ini ditunjukkan dari sedikitnya kebijakan di tingkat daerah yang mendukung program SPAB. Daerah-daerah yang sudah memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SPAB antara lain:

01 **DI Yogyakarta,** (melalui Perda 8/2010 tentang Penanggulangan Bencana)

02 **Kabupaten Sikka, NTT** (melalui SK Bupati Sikka 536/HK/2013 tentang Standar Sarana Prasarana dan Pengintregasian Pendidikan PRB di Sekolah)

03 **Kabupaten Rembang, Jawa Tengah** (melalui Perbup 44/2014 tentang Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah)

04 **Kabupaten Klaten** (melalui Perbup 6/2016 tentang pembelajaran kebencanaan Kab. Klaten)

05 **Provinsi DKI Jakarta** (melalui Pergub 187/2016 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana)

06 **Kabupaten Pidie Jaya, NAD** (melalui Perbup 11/2017 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana)

Aku ikut SMAB dengan teman-teman. Kami Belajar sambil bermain, membuat peta evakuasi dan belajar tentang sekolah aman. Di rumah aku menceritakannya kepada orang tuaku. Aku senang ikut SMAB

Salam

Putri

KARTU POS

Perangko

Kepada : kepala BNPB
Di Jakarta

Pengirim : Putri Zuliana
Kelas : IV (Empat)
SDN Ende 1
Ende, Flores, NTT

Kegiatan Penerapan Sekolah / Madrasah Aman Bencana - 2016



Dokumentasi Mariana Pardede, 2016

TO : Bupati Minahasa Utara

Nama : Amelia hernowo.

Nama Saya amelia hernowo kelas VIII Sekolah kami mendapat program sekolah madrasah aman bencana, dari BNPB.

[redacted], Saya merasa Senang mengikuti Smab, banyak pengalaman yang Saya dapat. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang Sudah membuat program ini, Untuk Sekolah saya SMP KR yobel. Saya juga merasa bangga bisa mengikuti SMAB, karna hanya orang tertentu saja yang dipilih. Banyak perubahan yang terjadi Selama mengikuti program SMAB Sekarang Saya Sudah tidak takut lagi karna Sudah tau cara-caranya.

1 bulan yang lalu ada gempa saat itu Saya keluar ruangan & mencari tempat terbuka.

Saya juga berharap Semoga kedepannya program dapat dilakukan disekolah lain Supaya anak-anak yang lain bisa tau apa yang dilakukan Saat ada bencana.

Demikianlah Surat dari Saya. Terima kasih.

Senin, 05 desember 2016

Amel



Pengetahuan masyarakat mengenai SPAB masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan juga banyak orang tua yang belum menyadari bahwa lokasi sekolah anak-anak mereka berada di wilayah rawan bencana.

Kemendikbud dan BNPB saat ini melakukan terobosan menggunakan teknologi pemetaan dengan integrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan peta ancaman bencana di seluruh Indonesia. Melalui website (smab.kemdikbud.go.id), setiap orang bisa mengetahui bahaya bencana apa saja yang mengancam Sekolah dimanapun di Indonesia.

Informasi yang ada akan dikembangkan lagi dimana kelak seluruh sekolah akan dikaji keamanan bangunan sekolah dan fasilitasnya terhadap ancaman bencana, sehingga setiap orang dapat mengetahui dimana kerentanan yang ada serta rekomendasi yang dapat dilakukan di tiap sekolah untuk memastikan sekolah tersebut aman dari bencana.

04

Penerapan program SPAB masih belum terkoordinasi dengan efektif dan pemantauannya masih dilakukan oleh masih-masing lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan.

Sejak tahun 2017, pemerintah mulai merintis agar setiap sekolah melaporkan status kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana secara rutin melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dengan sistem manajamen informasi pendidikan.



Data terkait dipantau secara berkala seperti seberapa sering sekolah melakukan simulasi bencana, pengadaan sarana penunjang keselamatan warga sekolah (contohnya alat pemadam api dan kotak pertolongan pertama), dan keberadaan prosedur sekolah di saat terjadi situasi darurat. Hal-hal ini penting untuk pihak terkait bisa memberikan intervensi sesuai dengan kondisi sekolah.

05

Terbatasnya pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya untuk memahami dan menerapkan program SPAB di sekolahnya.

Saat ini, program pelatihan dan peningkatan kapasitas masih bergantung pada dana yang dimiliki oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan besaran dana ini sangat terbatas. Sedangkan, Indonesia merupakan negara dengan perbandingan guru-peserta didik yang terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 360.000 guru.

Oleh karena itu, perlu diadakan terobosan agar guru-guru ini bisa memahami dan terampil dengan ilmu dasar penanggulangan bencana, seperti menyelamatkan diri dari bahaya bencana.



Pelatihan pengurangan risiko bencana dan pertolongan pertama untuk Guru, dokumen YSTC dan ASB, 2016



Dokumentasi YSTC, PLAN, YTBI, LIPI, 2017

06

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPAB YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENDIDIKAN

Pemerintah Indonesia mulai merintis integrasi pemantauan implementasi SPAB dengan sistem management informasi pendidikan. Data yang dimasukkan mandiri oleh pihak sekolah ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Adapun informasi yang dikumpulkan antara lain:

01 **Alokasi dana untuk mendukung penerapan SPAB**

02 **Keberadaan lembaga yang membantu pihak sekolah dalam penerapan SPAB**

03 **Lokasi sekolah terhadap potensi bahaya bencana yang mengancam**

04 **Keberadaan fasilitas pendukung keselamatan dari bencana, yaitu:**

a) Peta jalur evakuasi
b) Alat peringatan dini yang disepakati (sirine/ kentongan/ lampu bahaya)
c) Pintu kelas terbuka keluar
d) Rambu dan jalur evakuasi
e) Titik kumpul aman yang mudah dijangkau
f) Alat pertolongan pertama
g) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

05 **Audit kondisi bangunan dan fasiltias sekolah secara berkala**

06 **Tim siaga bencana sekolah yang melibatkan peserta didik**

07 Prosedur tetap penanggulangan bencana yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah

08 Rencana aksi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

09 Guru dan tenaga kependidikan lainnya yang sudah mengikuti pelatihan SPAB

10 Kampanye penyadaran mengenai kesiapsiagaan bencana kepada seluruh peserta didik

11 Simulasi yang dilakukan secara rutin

12 Sinergi antara rencana kesiapsiagaan sekolah dengan lingkungan sekitar



Dokumentasi YSTC, 2017

BAB 5

MEDIA KOMUNIKASI
INFORMASI EDUKASI

Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terkait kegiatan pendidikan bencana di Indonesia sangat banyak dan bervariasi jenisnya. Hal ini dikarenakan dibuat oleh berbagai pemangku kepentingan SPAB di Indonesia mulai dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. KIE yang ada bisa diakses di website smab.kemdikbud.go.id.

























Dokumentasi LPBI NU, Box Breaker, ASB, YSTC, KYPA, Plan International Indonesia, Unesco, Hope Indonesia, UNDP, Macquarie University, BNPB

A POSTER



Poster Aman dan Nyaman Sekolahku oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Poster dapat digunakan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi SPAB.

POSTER MERUPAKAN PENGUMUMAN ATAU IKLAN YANG BERISI INFORMASI, AJAKAN ATAU HIMBAUAN YANG BERBENTUK GAMBAR ATAU TULISAN YANG DITEMPELKAN DI DINDING, TEMBOK, ATAU TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG STRATEGIS AGAR MUDAH DIKETAHUI BANYAK ORANG.

Poster berisi gambar dan tulisan yang singkat, jelas, padat, dan langsung tepat sasaran serta mudah dimengerti. Poster juga dirancang agar dapat dibaca orang yang sedang bergerak (berkendara atau berjalan kaki) dan menarik perhatian. Ukuran konvensional dari poster adalah kertas ukuran A3 sampai dengan A0.

Di lingkungan sekolah, poster dapat digunakan sebagai sarana agar peserta didik mengenali jenis-jenis bencana, tanda-tanda kejadian bencana, bagaimana cara melakukan evakuasi, dll. Pembuatan poster dapat dibuat secara mandiri oleh peserta didik sendiri maupun selain peserta didik.

B KOMIK

Komik edukasi adalah salah satu jenis komik yang kini sedang berkembang di masyarakat. Salah satu keunikan jenis komik ini adalah selain memiliki konten cerita dan narasi komik pada umumnya, komik edukasi juga memiliki konten edukasi dan informasi terkait subjek pelajaran yang disampaikannya, sehingga cocok digunakan untuk media pembelajaran.

Cerita bergambar merupakan media yang tepat untuk anak bermain sambil belajar. Ketika anak melihat gambar, anak dilatih bermain motorik halusnya untuk berimajinasi. Komik biasanya memiliki tokoh cerita yang menyampaikan pesan dan informasi sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam komik.





Komik tentang Kesiapsiagaan Tsunami, Banjir dan Kebakaran, BNPB, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, PLAN dan YTBI, 2014, 2015

Alur cerita yang disampaikan sebaiknya mudah dicerna dan pesan yang disampaikan harus jelas. Jika komik dibuat untuk tingkat pendidikan tertentu maka bahasa dan gambar yang ditampilkan dapat disesuaikan sehingga pembelajaran yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu juga perlu diperhatikan ketepatan dalam penggunaan istilah dan kesesuaian dengan EYD.

C BROSUR



CSS Framework, 2012

Media komunikasi dalam ukuran kertas A4 atau A5 yang dapat dilipat menjadi 3 atau 4 dan memiliki susunan headline, gambar dan informasi. Di dalamnya berisi informasi tentang konsep sekolah aman. Contohnya adalah brosur Sekolah aman yang komprehensif produk dari gabungan 12 lembaga di Indonesia. Media ini mudah didistribusikan tapi jangkauannya terbatas dan ditujukan untuk khalayak umum.

D BUKU PANDUAN

Di dalamnya berisi panduan bagaimana mengembangkan SMAB di suatu sekolah. Bukunya terbagi menjadi dua bagian, yaitu manual dan penjelasannya. Dalam manualnya berisi dua bagian modul dan yang kedua panduan untuk fasilitatornya.

Contohnya adalah dari PMI.

Di sini ada 3 buku, yaitu :

1. Modul manual Ayo Siaga Bencana
2. Panduan fasilitator Ayo Siaga Bencana
3. Pengurangan risiko berbasis remaja



Dokumentasi PMI, 2008

E LEMBAR BALIK



Dokumentasi YSTC,2016



Dokumentasi Plan International Indonesia, 2014

Bahan pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik dalam sosialisasi dan implementasi kegiatan SPAB.

F VIDEO

Video adalah media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. BNPB memiliki kanal Youtube yang berisikan video-video terkait pendidikan kebencanaan. Video untuk KIE dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. VIDEO DOKUMENTER

Di dalamnya memperlihatkan proses kegiatan SMAB di suatu sekolah dilengkapi dengan pernyataan dari berbagai pihak yang terkait kegiatan SMAB di sekolah tersebut. Biasanya durasinya pendek sekitar 5 menit. Contohnya adalah video documenter KYPA dan Plan Internasional yang berjudul: Sekolah Aman, Prestasi Gemilang

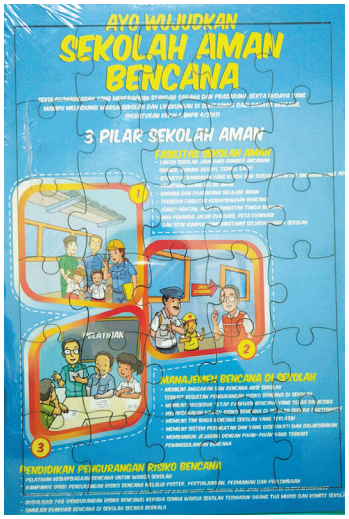
2. VIDEO ANIMASI/KARTUN

Di dalamnya berisi cerita/drama tentang kondisi suatu lokasi dan kegiatan membangun kesiapsiagaan suatu daerah/sekolah. Tokoh tokoh di dalamnya berupa kartun dan durasinya sekitar 30 menit. Contohnya adalah film yang dibuat oleh MDMC yang berjudul Anak Siaga Bencana di link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=tDaY52QLj-8

3. FILM

Di dalam film ini berisi kisah suatu masyarakat yang mengalami suatu bencana dan mengantisipasinya. Misalnya adalah film Boneka Si Badu yang diproduksi oleh IDEP. Serial film tentang kisah-kisah bencana di desa Wanabalu. Badu dan masyarakat dalam film mengantipasi bencana agar risiko bencana menjadi berkurang. Link filmnya Kisah Bencana Gempa bumi: https://www.youtube.com/watch?v=-NdwLQH2R_M

F ALAT PERMAINAN (KONVENSIONAL, ELEKTRONIK)



Mariana Pardede, 2017



Plan International Indonesia, 2013



Unesco, 2016

Untuk mempermudah belajar tentang kesiapsiagaan bencana, adaptasi perubahan iklim dan materi terkait SPAB, dikembangkanlah sejumlah permainan, baik permainan manual konvensional, maupun permainan elektronik. Alat bermain tersebut diantaranya:

1. **ULARTANGGA SIAGA BENCANA**
2. **KARTU BERGAMBAR SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA**
3. **KARTU BERGAMBAR BERUKURAN**
4. **KUARTET SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA**
5. **BOARD GAME/ PAPAN PERMAINAN PRB DAN API**
6. **MONOPOLI SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA**
7. **DOMINO SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA DAN PRB**

   Permainan kartu domino yang dimodifikasi muatan sekolah aman bencana dan kesiapsiagaan bencana. Berukuran 4x6 terbuat dari kertas tebal. pengguna minimal usia kelas 3 SD.
8. **PUZZLE SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA**
9. **PERMAINAN DALAM BENTUK APLIKASI**

   Permainan ini umumnya bisa diunduh di Playstore (android) dan App Store (IOS) dengan judul permainan antara lain:

   1. Sekolah Aman (luminov/PLAN Internasional Indonesia)
   2. Sai Fah (Opendream/UNESCO)
   3. Tanah sang Penakluk Tsunami dan Gempa bumi (Opendream/UNESCO)

G ALAT PERAGA



dokumentasi YSTC, 2016



Dokumentasi Box Breaker, 2017

Alat peraga digunakan untuk membantu anak untuk belajar mengenai bencana. Alat peraga yang ada saat ini adalah alat peraga gunung api. Terbuat dari tanah liat, dibuat menyerupai gunung api berkawah, dengan kelengkapannya berupa soda kue dan air yang diberikan pewarna merah.



Dokumentasi LPBI NU, 2015



Dokumentasi KYPA, 2014

BAB 6

PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA

DI TAHUN 2030

DEKLARASI MAGELANG 2017

MENUJU SPAB 2030

Kami merekomendasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya untuk:

01 Menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek & Dikti), dan kementerian/lembaga tentang Pendidikan Bencana.

02 Menerbitkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menristek & Dikti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pendidikan Bencana dan pembiayaannya.

03 Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang aman dan aksesibel untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

04 Membentuk Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) di tiap kabupaten/kota.

05 Membentuk Sekolah Madrasah Darurat Terpadu sebagai wujud sekolah bersaudara *(sister school)* yang terintegrasi dalam program SMAB.

06 Mendorong dunia usaha lebih banyak terlibat aktif dalam pendidikan bencana.

KEBIJAKAN DAN PERATURAN MENGENAI SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA TELAH DISAHKAN DAN DITERAPKAN SECARA OPTIMAL 01



Pada September 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, bersama Konsorsium Pendidikan Bencana, sudah memulai penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Kementerian dan Kebudayaan (Permendikbud) terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana. Rancangan Permendikbud ini akan menggantikan Surat Edaran yang ada dan mendorong sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana untuk memastikan sekolahnya aman dari risiko bencana sebagai salah satu kewajiban sekolah.

Peraturan ini akan mencakup berbagai hal, antara lain:

a) Penggunaan dana anggaran pendidikan (mis: BOS, DAK, sll) dan/ atau eksternal (mis: LSM, swasta, dana desa) untuk mendukung pencapaian satuan pendidikan aman bencana
b) Komponen satuan pendidikan aman bencana menjadi kriteria akreditasi sekolah dan peniliaian kompetensi guru
c) Program satuan pendidikan aman meliputi seluruh aspek secara komprehensif dan terintegrasi, yaitu memastikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan aman bencana, diterapkannya pendidikan aman bencana kepada seluruh peserta didik, serta adanya manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan anak-anak dan masyarakat sekolah lainnya
d) Penerapan pendidikan bencana melalui terintegrasi pada kurikulum dan diterapkan melalui mata pelajaran yang ada, sebagai muatan lokal, atau di esktra kurikuler
e) Program satuan pendidikan aman melibatkan seluruh masyarakat sekolah secara inklusif, termasuk anak-anak dan orang yang berkebutuhan khusus
f) Pengadaan tenaga pendamping untuk edukasi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana
g) Program satuan pendidikan aman bencana mencakup setiap jenjang pendidikan dan mengatur keterlibatan seluruh pihak sekolah, termasuk komite sekolah
h) Program Satuan Pendidikan Aman Bencana mempertimbangkan keunikan/kekhususan wilayah/daerah masing-masing
i) Sinkronisasi dengan program-program yang sudah ada, seperti sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak, dll.
j) Program Satuan Pendidikan Aman Bencana didukung oleh seluruh pihak, termasuk dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang relevan, LSM, serta pihak swasta

02 SEKNAS BERJALAN MAKSIMAL TERMASUK MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PIHAK SWASTA



Sekretariat nasional (seknas) untuk satuan pendidikan bencana telah dibentuk tahun 2015, digawangi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan BNPB, Kementerian Agama, dan Kementerian Negara PPPA. Koordinasi dan kolaborasi seknas dengan sektor swasta akan lebih kuat terutama pada dukungan perencanaan program, implementasi dan monitoring/evaluasi.

AKSES MATERI AJAR TERKAIT SPAB TERDAPAT DI WEBSITE SPAB 03



Website SPAB akan menjadi pusat informasi untuk berbagai materi ajar dan dokumentasi praktik pendidikan bencana yang dapat diakses oleh semua penggiat SPAB yang ramah pengguna. Materi ajar dan dokumentasi praktik juga dapat diakses dan digunakan oleh orang yang berkebutuhan khusus

04 MATERI SPAB TERMASUK BAGIAN DARI KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISA DIAKSES PULA MELALUI E-LEARNING



Unicef, 2015

Terintegrasi materi SPAB kedalam kurikulum pusat pendidikan dan pelatihan guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Materi SPAB diakses melalui sistem e-learning *(online/offline)* bagi guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah yang tidak memiliki kesempatan menghadiri pelatihan tatap muka. E-learning dari instansi lain seperti damkar dan SAR juga dapat menjadi bahan rujukan.

Selain menjadi bahan kompetensi, e-learning dapat menjadi rujukan bagi SKPD pemerintah dan masyarakat tentang materi SPAB.

1% DARI ANGGARAN PENDIDIKAN DIALOKASIKAN UNTUK SPAB 05



Dari 20% anggaran APBN untuk pendidikan agar dialokasikan 1% untuk pelaksanaan SPAB sehingga program yang direncanakan dapat berjalan

06 JUKNIS TERKAIT ALOKASI DANA DARI BOS DIPAHAMI OLEH SELURUH GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SEKOLAH MENGALOKASI-KAN ANGGARAN SPAB DARI DANA BOS



Petunjuk teknis penggunaan BOS 2017 yang dikeluarkan dari Kemendikbud sudah memasukkan kegiatan sekolah aman. Sekolah di Banda Aceh telah memasukkan program SPAB kedalam RKAS untuk didanai melalui dana BOS. Namun sekolah lain belum siap dan memahami penggunaan BOS tersebut untuk SPAB. Kedepannya, diharapkan seluruh sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk juga memastikan program SPAB berjalan dengan lancar dan efektif

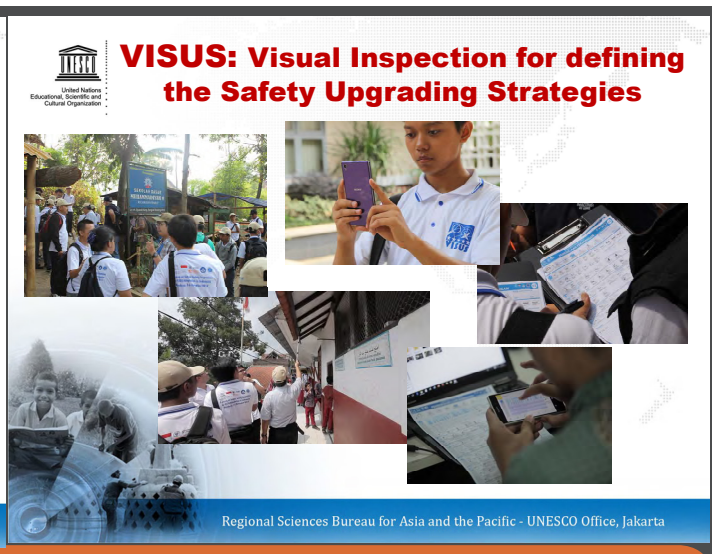
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPAB TERINTEGRASI DI DAPODIK 07



Saat ini, pencapaian indikator SPAB akan dimonitor secara berkala dalam sistem dapodik yang diisi langsung oleh pihak sekolah. Dengan adanya integrasi ini, data implementasi SPAB dapat diawasi dalam *Education Management Information System* (EMIS).

08 AUDIT KEAMANAN BANGUNAN SECARA BERKALA





Dana dialokasikan untuk melakukan audit keamanan bangunan di semua sekolah, terutama sekolah yang berlokasi di rawan bencana. Teknologi/aplikasi audit yang sudah ada seperti VISUS dan aplikasi kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami serta kolaborasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dapat membantu agar audit keamanan bangunan menjadi mudah dan murah

SIMULASI RUTIN DI SEKOLAH DUA KALI SETAHUN 09



Visi kedepan adalah semua sekolah terutama yang berlokasi di rawan bencana tinggi harus melakukan simulasi bencana berkala minimal 2x dalam setahun karena untuk melatih komunitas sekolah dalam membentuk budaya aman bencana perlu dilakukan secara rutin.

Simulasi akan lebih efektif bila dilakukan sebelumnya musim bencana terjadi, khususnya untuk menghadapi ancaman bencana yang rutin terjadi dan pada periode tertentu. Misalnya, simulasi dilakukan sebelum musim hujan tiba (untuk daerah yang rawan Banjir) atau dilakukan sebelum musim kemarau tiba (untuk daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan)

10 KOLABORASI ANTAR KEMENTERIAN DENGAN MULTIPIHAK BERJALAN OPTIMAL



Seluruh kementerian terkait (Kemdikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, BNPB, Kemensos, Kemenkes) memiliki peraturan setingkat menteri tentang pelaksanaan SPAB dan juga dapat mengeluarkan kebijakan lainnya yang dapat mendukung implementasi SPAB di tingkat pusat dan daerah.

Salah satu contoh penerapannya adalah masyarakat bisa mengakses dana desa untuk kepentingan SPAB di berbagai jenjang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2007). UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diambil dari: http://peraturan.go.id/uu/nomor-24-tahun-2007.html

BNPB. (2013). Direktori Sekolah Madrasah Aman Bencana. Jakarta, Indonesia: BNPB.

BNPB. (2017). Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Diambil dari: http://dibi.bnpb.go.id/

BPBD DKI Jakarta. (2013). Peta Sebaran Lokasi Banjir (RW) Tahun 2013. Jakarta, Indonesia: BPBD DKI Jakarta.

BPBD DKI Jakarta. (2017). Peta Wilayah Banjir Sementara. Jakarta, Indonesia: BPBD DKI Jakarta.

Kemendikbud. (2017a). Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar dan Menengah. Diambil dari: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Kemendikbud. (2017b). Sekolah Aman Bencana. Diambil dari: http://smab.kemdikbud.go.id/

Pemerintah Kabupaten Klaten. (2016). Peraturan Bupati Klaten no. 6 tahun 2016 tentang Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. (2017). Peraturan Bupati Pidie Jaya no. 11 tahun 2017 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana. Pidie Jaya, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintah Kabupaten Rembang. (2014). Peraturan Bupati Rembang no. 44 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah. Rembang, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten Sikka. (2013). Surat Keputusan Bupati Sikka No. 536/HK/2013 tentang Standar Sarana Prasarana dan Pengintregasian Pendidikan PRB di Sekolah). Maumere, Sikka: Pemerintah Kabupaten Sikka.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. (2010). Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari: http://peraturan.go.id/perda/provinsi-di-yogyakarta-nomor-8-tahun-2010-11e452bd9a4948309120313634353031.html

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2016). Peraturan Gubernur DKI Jakarta no. 187 tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah Madrasah Aman Bencana. Diambil dari: http://disdik.jakarta.go.id/index.php/2017-01-20-03-02-46/provinsi-dki-jakarta/336-pergub-nomor-187-tahun-2016

World Bank. (2014). A Practical Guideline to Making School Safer from Natural Disaster for School Principals and School Committees. Diambil dari: http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/881/Making%20school%20safer%20from%20natural%20disasters%20Guide%20-%20Indonesia.pdf

PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA "Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia"

2017

Yayasan Sayangi Tunas Cilik
Partner of Save the Children

Didukung oleh:

PLAN INTERNATIONAL

unicef
for every child